

PERAN DAN PARTISIPASI POLITIK ORGANISASI NASYIATUL AISYIYAH DALAM MENGINTERNASASIKAN KEBIJAKAN BERPERSPEKTIF GENDER DI KOTAPALEMBANG TAHUN 2016

Amaliatulwalidain¹⁾

¹⁾*Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129
Email : amaliatulwalidain@yahoo.co.id¹⁾*

ABSTRACT

This research focuses on the role and political participation of Nasyyiatul Aisyiyah organization in internalizing gender perspective policy as a reference for local government in formulating a gender responsive regional regulation in Palembang City. This research was conducted at provincial Nasyyiatul Aisyiyah Organization (PWNA), city level, to the level of twig that existed all sub-district in Palembang city. Theories and Concepts used in answering research questions using Role theory, and Political Participation, while the method in this study, using qualitative analytical research methods using primary data types obtained directly from the object of research by spreading research questions to informants consisting of all The administrators of the Nasyyiatul Aisyiyah Organization from the regional / provincial (PWNA), regional / city (PDNA) levels, to the sub-district / branch level (PRNA). From the research, it was found that the role of political participation of Nasyyiatul Aisyiyah organization in internalizing the gender perspective policy in Palembang City, firstly done through internal organization program such as Family Learning Center with institutional strengthening and cadre, in order to have capacity in responding the problem Women as part of public policy. Extradition programs that have been carried out are cooperation and MOU with BNN in handling Drug hazard, and also held an auditor with Child and Women Protection Agency of South Sumatera Province in providing Lactation Room in several public places.

Keywords : *Role, Political Participation, Nasyyiatul Aisyiyah, Gendered Perspectives Policy*

1. Pendahuluan

Secara nyata peran politik perempuan hingga saat ini, masih menjadi kajian yang serius untuk diteliti lebih dalam lagi khususnya keterlibatan perempuan pada perumusan kebijakan. Apabila dicermati, kaum perempuan masih belum bisa menunjukkan eksistensi dominan ditengah-tengah kaum laki-laki sebagai mayoritas. Banyak kalangan menilai, posisi tawar perempuan masih sangat lemah untuk bisa terjun dalam kancah politik. Salah satu faktor dominan yang menghambat kreatifitas perempuan dalam menjalankan peran politiknya adalah budaya patriaki, yang secara tidak langsung menyebabkan perempuan termarginalkan dalam dunia politik. Budaya patriaki selama ini melambangkan superioritas laki-laki, membuat perempuan terkadang cenderung tidak berani tampil untuk menuntut hak-haknya.

Akibat konstruksi pemahaman pemikiran tersebut, perempuan mengalami marginalisasi khususnya menyangkut kepentingan mereka yang tidak dapat diintergrasikan secara bebas dan menyeluruh. Isu-isu kepentingan perempuan dalam menuntut kesetaraan agar diberikan posisi yang sama dengan laki-laki pada proses kehidupan, sama sekali terhambat oleh budaya patriaki. Kesenjangan gender kerap kali menimbulkan persepsi yang salah dalam konteks peranan gender dalam masyarakat. Nilai- nilai patriarki sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam kebudayaan Indonesia. Fenomena

ini, bahkan masih tetap bertahan meskipun gender telah lama berkembang sebagai wacana dan negara telah menjadikannya sebagai arus kebijakan publik (Muhajir Darwin, 2005 : 42). Patriarki merembes kesemua aspek masyarakat dan sistem sosial, kini sistem dan struktur lebih memberi hak kepada laki-laki, sehingga tak jarang mengorbankan perempuan akibat tidak adanya kesetaraan (*unequal*) antara laki-laki dan perempuan. (Julia Cleves Mosse, 2007 : 65)

Respon terhadap fenomena tersebut menyebabkan lahirnya *United National Commission on the status of women* (CSW) pada tahun 1946 disesi pertama persidangan *Economic and Social Council* (ECOSOC). CSW dalam Majelis umum PBB yang kemudian lebih dikenal dengan *Women Commite* dibentuk dan komisinya ditunjuk langsung oleh negara anggota PBB kala itu, dengan tujuan untuk membuat rekomendasi kepada ECOSOC bagi perbaikan kondisi politis, ekonomi, sosial, serta status sipil khususnya bagi perempuan.

Salah satu prakarsa CSW adalah dengan mengusulkan kepada PBB untuk mencanangkan *International Women's Year* pada tahun 1975 dan menyelenggarakan Konferensi Internasional PBB pertama tentang perempuan di Mexico City pada tahun 1975 dengan tiga isu pokok: penyetaraan gender, penghapusan dikriminasi gender, pengintegrasian dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam pembangunan,

serta peningkatan kontribusi perempuan dalam perdamaian dunia. Konferensi kedua berlangsung di Conpenhagen pada tahun 1980. Konferensi ketiga berlangsung di Nairobi pada tahun 1985 serta yang keempat di Beijing pada tahun 1995. (Riant Nugroho, 2008: 87)

Sebelumnya pada konferensi internasional hak asasi manusia di Wina Austria pada tahun 1993, telah ada kesepakatan (*Platform For Action and 12 Areas of Concern*) salah satu isi dalam 12 point tersebut adalah “perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan”. Posisi perempuan tidak hanya dilihat dalam konteks sebagai sasaran dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara, tetapi mengacu pada kesetaraan gender, agar perempuan juga mempunyai partisipasi untuk bisa terlibat langsung dalam setiap perumusan kebijakan apalagi yang menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka. Selama ini, budaya patriarki seolah sudah menjadi *Status quo* yang secara institusional telah meminggirkan hak-hak perempuan dalam ranah publik.

Atas dasar tersebut sebelumnya Upaya memberikan ruang kepada perempuan pada proses pembangunan dan politik khususnya keterlibatan di perumusan dalam kebijakan yang berperspektif gender, maka semakin dipertegas kembali pada konferensi internasional perempuan ke empat di Beijing pada tahun 1995 dengan menghasilkan kesepakatan yang lebih luas lagi terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan atau yang dikenal dengan *Gender Mainstreaming* (pengarusutamaan gender). Tujuan dari *Gender Mainstreaming* sebagai keperluan mendukung perempuan dalam pembangunan dan bagaimana memasukkan nilai-nilai perempuan ke dalam pembangunan. (Riant Nugroho, 2008 : 87)

Dalam pertemuan tersebut, titik pandang terhadap isu gender mulai bergeser, konferensi pertama yang menekankan partisipasi perempuan pada pembangunan sedangkan konferensi keempat menaruh tekanan pada partisipasi penuh kaum perempuan pada pengambilan keputusan. Partisipasi yang dimaksudkan sebagai restrukturisasi disetiap institusi. Kesetaraan gender hanya bisa diraih melalui perubahan struktural diseluruh institusi masyarakat termasuk relasi perempuan dan laki-laki dalam ranah privat. (Liza Hadiz, 2004 : xi)

Selain itu juga pada sasaran pembangunan Millennium (*Millennium Development Goals/ MDGs*) yang ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September tahun 2000, yang diadopsi oleh 189 negara termasuk juga Indonesia, dengan delapan tujuan untuk dicapai pada tahun 2015, salah satunya mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan mengurangkan “perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah” untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2016 yang merupakan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya tersebut kemudian tertuang dalam Inpres No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Inpres Nos 9 tahun 2000 mencakup propinsi/kabupaten/kota diseluruh Indonesia praktis menjadi kerangka hukum dalam mewujudkan pengarusutamaan gender secara substansi, sehingga dapat diimplementasikan pada praktek pemerintahan di daerah-daerah yang tidak hanya berkonsentrasi pada tataran pembangunan saja, tetapi juga menjadi acuan dalam keterlibatan peran perempuan pada kehidupan politik.

Perjuangan pengarusutamaan gender tidak hanya berupa dalam mekanisme sebatas tindakan *Affirmative Action* melalui keterwakilan perempuan pada kelembagaan formal, tetapi pada tataran kultural yaitu dengan melibatkan organisasi dalam masyarakat (*civil society*) khususnya organisasi perempuan dalam upaya mengimplementasi pengarusutamaan gender di masyarakat. Usaha dalam melibatkan organisasi perempuan terutama untuk meninternalisasi nilai-nilai gender dalam kehidupan sosial, tentu terkait dengan peran dari organisasi tersebut yang sebagai ujung tombak penghubung kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.

Khusus di Kota Palembang, peran organisasi perempuan untuk menginternalisasi nilai-nilai gender menjadi kebijakan yang berperspektif gender dapat dilihat dari peran organisasi perempuan Nasyiatul Aisyiyah. Organisasi ini, adalah salah satu organisasi wanita muda yang merupakan organisasi otonom bentukan dari organisasi Muhammadiyah yang difungsikan untuk memperhatikan masalah perempuan dan anak-anak.

Pada Muktamar Nasyiatul Aisyiyah ke XII di Lampung (3-6 Juli 2012) peran Nasyiatul Aisyiyah tersebut dipertegas dengan keharusan Nasyiatul Aisyiyah untuk ikut menyukseskan program *Millennium Development Goals/ MDGs*, terlebih lagi dalam mengadvokasi masalah perempuan dan anak, mengingat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali permasalahan yang.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah dan pertanyaan penelitian adalah “Bagaiman peran dan partisipasi politik Organisasi Nasyiatul Aisyiyah dalam internalisasi kebijakan yang berperspektif gender di Kota Palembang Tahun 2016” ?

B. Tinjauan Pustaka

1) Gender

Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan terlebih dahulu kata gender dengan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti

daftar berikut ini : laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur vagina, dan mempunyai alat menyusui. (Mansour Fakih, 2008 : 8)

Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah-lembut, cantik, emosional, lemah-lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. (Mansour Fakih, 2008 : 8)

Pengembangan konsep Gender sebagai alat analisis merupakan pencapaian terbesar dari studi gerakan perempuan. Konsep "perempuan" dan "laki-laki" tidaklah ditinjau dari segi biologis (seks) tetapi dari bangunan budaya (gender) yang pada dasarnya tidak stabil, dengan demikian berdampak pada masalah besar teori. Tetapi dalam bahasa Indonesia misalnya, salinan untuk keduanya, *sex* maupun *gender*, biasanya "jenis kelamin". Secara utuh, arti gender secara sosial dan alamiah tercermin dalam analisis yang mendua dalam penulisan sejarah gerakan perempuan terdapat perbedaan yang sering diwarnai dengan determinasi biologis. (Saskia Wieringa, 2010 : 64)

Istilah 'gender' pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1986) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. (Riant Nugroho, 2011 : 3)

Suzanne Williams, Janet Seed, dan Adelina Mwu dalam *The OXFAM Gender Training Manual*, mengartikan gender sebagai berikut :

".....manusia dilahirkan dan dididik sebagai bayi perempuan dan bayi laki-laki supaya kelak menjadi anak perempuan dan laki-laki serta berlanjut sebagai perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Mereka dididik tentang bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan, dan melakukan pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan laki-laki dewasa. Mereka dididik bagaimana berelasi diantara mereka, sikap-sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk identitas diri dan peranan gender mereka dalam masyarakat."

Sedangkan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, mengartikan 'gender' adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).

Sedangkan Hilary M. Lips (Hilary, 1993 : 4) dalam bukunya yaitu *Sex & Gender : an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender. (Linda L, 1990 : 2)

Sementara teoritikus feminisme lainnya telah membuat pengembangannya. Pendekatan yang dilakukan oleh Scott (1989) dinilai paling berguna bagi pembahasan sejarah. Menurut pendapatnya, gender itu "suatu elemen pembentuk hubungan sosial berdasar perbedaan-perbedaan yang disadari terkait perbedaan jenis seks" serta cara utama menandai hubungan kekuasaan. Bagian pertama konsep tersebut sangat cocok bagi penelitian gerakan perempuan, sedang bagian kedua berguna untuk menggambarkan luasnya perubahan sosial, semisal peristiwa 1965 di Indonesia. (Saskia Wieringa, 2010 : 65)

Selanjutnya Scott menunjuk persoalan gender dalam empat konfigurasi yang saling hubungan. Pertama, hadir dalam bentuk simbol-simbol budaya – di Indonesia di antaranya berbentuk tokoh-tokoh wayang seperti Sumbadra atau Srikandi yang muncul bertentangan dengan model keperempuanan, patuh versus militansi. Kedua, muncul sebagai konsep normatif yang biasanya dalam bentuk pasangan. Di Indonesia hal itu bukan saja merujuk pada maskulinitas dan femininitas, tetapi meluas ke soal sosial dan politik. Dalam anggapan yang dibakukan Jenderal Soeharto selama pembantaian sesudah kudeta 1 Oktober 1965-*order* atau keteraturan itu bersifat betina. Ketiga, perjuangan terhadap pandangan dan simbol-simbol ini bersifat politis. Dalam sejarah Indonesia, terdapat dua periode perjuangan yang diwarnai kekerasan dengan dampak yang rumit bagi definisi simbol dan konsep gender.

2) Kebijakan Yang Berspektif Gender

Pada Konferensi Perempuan keempat di Beijing, pada tahun 1995, *Platform of Action* secara tegas mendukung konsep pengarusutamaan gender dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempermosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program-program yang berspektif gender (Riant Nugroho, 2008 : 84). Dalam upaya mewujudkan pembangunan millineum tahun 2016, ada delapan tujuan pembangunan yang mesti dicapai, yakni pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pada September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189 negara lain, berkumpul Pertemuan Puncak Milenium Development Goals (MDGs) di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan tersebut, termasuk juga Indonesia. Salah satu point terpenting dari delapan point tersebut adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, serta sektor publik lainnya.

Dalam upaya menghadapi tantangan yang terkadang bias gender, tujuan dari *Millenium Development Goal* ((MDGs) adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di segala bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan; merevisi peraturan perundang-undangan yang bias gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan; meningkatkan kesempatan kerja dan partisipasi perempuan dalam pembangunan politik dan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender di seluruh tahapan pembangunan dan diseluruh tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) yang kemudian tertulis pada INPRES No 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender.

Lebih lanjut tujuan pemerintah dengan menerbitkan INPRES No 9 Tahun 2000, mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kondisi perempuan Indonesia. Pengarusutamaan gender di seluruh bidang dan kegiatan pembangunan telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada program-program yang responsif gender. Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi. Program lain yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat Propinsi/kabupaten/kota.

Program-program responsif gender berkaitan erat dengan kebijakan yang berperspektif gender dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan dengan adanya kendali dan manfaat khususnya untuk perempuan. Dalam mewujudkan terciptanya keadilan kesetaraan gender, maka pembangunan tidak hanya diperkuat dalam segala bidang yang responsif gender, tetapi yang paling perlu adalah keterlibatan perempuan dalam proses.

3) Peran

Pada Teori Peran, peranan secara spesifik-

menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang terlibat dalam apa-apa yang ditentukan oleh Budaya. Peranan dapat dilihat dari sejauh mana individu-individu dan kelompok dalam masyarakat dapat mengorganisasikan, mengarahkan kekuatan-kekuatan tersebut menjadi semacam keinginan dan kepentingan bersama yang dinegosiasikan.

Menurut Soejono Soekanto, peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Peranan dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*sociol-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. (Soejono Soekanto, 2000 : 269)

Sedangkan menurut Groos Masae dan Mc Eachecry, peranan adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan pada kedudukan mereka. Harapan-harapan tersebut merupakan kesinambungan dari norma-norma sosial, dimana harapan-harapan tersebut menyangkut (David Berry, 1982 : 99)

- a. Harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Maka dalam konteks ini, Nasiyatul Aisyiyah sebagai organisasi perempuan menjadi sangat penting, terlebih lagi peran dan fungsinya dalam mengorganisir dan mengakomodasi berbagai kepentingan kaum perempuan terutama yang mengacu pada INPRES No tahun 2000 agar kepentingan dari kaum perempuan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah khususnya di Sumatera Selatan dalam proses perumusan kebijakan yang responsif gender.

4) Partisipasi Politik

Keberadaan struktur – struktur atau institusi – institusi politik di tingkat masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, organisasi kemasyarakatan dan media massa yang kritis dan aktif, merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik. Dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa aktivitas- aktivitas politik pemerintah dengan serta – merta secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan maka keterlibatan rakyat adalah suatu kelaziman. (Deden Faturohman, 2004 : 183)

Fungsi – fungsinya dijalankan oleh Partai politik, kelompok kepentingan, dan struktur-struktur lainnya dalam infrastruktur politik, merupakan wujud dari

keikutsertaan rakyat dalam proses politik dalam suatu sistem politik. Dalam ilmu politik dikenal konsep partisipasi politik, untuk mengabstraksikan fenomena-fenomena tersebut. Konsepsi partisipasi politik menurut Miriam Budiarto adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). (Deden Faturahman, 2004 : 187)

Dalam tataran praktis, partisipasi politik bisa muncul dalam beberapa bentuk. Setiap bentuk – bentuk partisipasi politik akan berisikan gaya, tuntutan, pelaku dan sampai pada tindakan – tindakan yang dilakukan warga negara dalam konteks politik. Selain itu juga berkenaan dengan jumlah orang yang terlibat dalam bentuk – bentuk partisipasi politik, tidak harus selalu dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi bisa juga dilakukan oleh hanya satu orang.

Upaya masyarakat untuk menunjukkan apa yang dianggap baik sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya bisa dilakukan dengan melalui berbagai cara, seperti memilih partai politik yang mengangkat isu sesuai dengan prefensinya, memilih kandidat yang memperjuangkan program sesuai dengan prioritasnya, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang sedang menjadi agenda publik. Cara-cara ini bisa dilakukan secara pribadi (sebagai warga negara) maupun kelompok yang terorganisir dalam organisasi.

Berdasarkan riset-riset tentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik. Bentuk – bentuk ini masing – masing memiliki tujuan yang sama, yaitu berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi proses – proses politik. Bentuk – bentuk itu diantaranya : (Deden Faturahman, 2004 : 190)

1. Kegiatan Pemilihan, mencakup memberikan suara, sumbangan – sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. Lobbying, mencakup upaya – upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat – pejabat pemerintah dan pemimpin – pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan mereka mengenai persoalan – persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi, yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari Koneksi (*contacting*), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat – pejabat pemerintah, dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) sebagai usaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian

fisik terhadap orang – orang atau harta benda, kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (huruhara, pemberontakan) atau mengubah seluruh sistem.

Dari berbagai aktivitas-aktivitas ini, kita dapat melihat keberagaman aktivitas dalam partisipasi politik, dari hal yang paling sederhana hingga yang kompleks, dari bentuk-bentuk yang mengedepankan kondisi damai sampai pada tindakan-tindakan kekerasan. Namun seluruh aktivitas ini termasuk dalam kerangka partisipasi politik, setiap tindakan yang berhadapan dengan pembuat dan pelaksana kebijakan, dan partisipan terlibat untuk mempengaruhi jalannya proses tersebut agar sesuai kepentingan dan aspirasinya.

B. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengamatan penulis, penelitian tentang Peran Dan Partisipasi Politik Organisasi Nasyiatul Aisyiyah Dalam Menginternalisasi Kebijakan Responsif Gender di Kota Palembang pada tahun 2015 belum ada yang melakukan. Akan tetapi ada beberapa rujukan yang menjadi gagasan dalam penelitian ini, khususnya yang mengambil fokus penelitian tentang organisasi Nasyiatul Aisyiyah adalah penelitian dari Disertasi DR Hamidah (2008) dengan judul Gerakan Wanita Islam Indonesia : Suatu Kajian Sosio Historis terhadap Aisyiyah-Nasyiatul Aisyiyah Dan Muslimat-Fatayat Nu, yang lebih menyoroti secara historis proses berdirinya organisasi Nasyiatul Aisyiyah khususnya sebelum kemerdekaan, memang dari awal didirikan sudah ditujukan untuk pemberdayaan kaum perempuan dan kemampuan intelektual, secara tidak langsung Nasyiatul Aisyiyah sudah memperjuangkan kesetaraan gender pada masa tersebut.

Penelitian dari Ali Yuddin (2004) dengan judul Gerakan Feminis Muslim : Antara Wacana Dan Praksis (Penelitian pada Nasyiatul Aisyiyah) menyatakan bahwa Nasyiatul Aisyiyah mempunyai peran besar dalam melahirkan ide-ide kesetaraan gender yang kemudian menjadi landasan perjuangan organisasi hingga sekarang.

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan partisipasi politik organisasi Nasyiatul Aisyiyah dalam internalisasi kebijakan responsif gender di kota Palembang tahun 2016.

2) Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan informasi baru, khususnya tentang peranan dan partisipasi politik organisasi Nasyiatul Aisyiyah dalam merumuskan kebijakan responsif gender di Kota Palembang pada tahun 2016.

2. Sebagai sumbangsih pengetahuan dan rujukan referensi bagi kalangan akademisi yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai peran organisasi Nasyiatul Aisyiyah dalam menginternalisasi kebijakan responsif gender tersebut, khususnya dalam memberikan pemahaman tentang kebijakan berperspektif gender pada masyarakat Kota Palembang.

2. Pembahasan

A. Gerakan Nasyiatul Aisyiah Sebagai Gerakan Pembaharuan Perempuan Muda Muslim

Kemunculnya Gerakan Nasyiatul Aisyiyah di Indonesia, tentu tidak bisa dari Organisasi Muhammadiyah, karena dalam organisasi Muhammadiyah ada dua sayap organisasi perempuan, yaitu Aisyiyah yang diperuntukkan bagi kaum wanita dewasa dan satu lagi Nasyiatul Aisyiyah yang diperuntukkan bagi kaum wanita muda. Organisasi-organisasi ini, baik Aisyiyah, maupun Nasyiatul Aisyiyah secara khusus bertugas untuk mempermudah laju dan gerak organisasi khususnya pada pengkaderan kaum perempuan Muhammadiyah.

Sedangkan secara umum, keberadaan dari Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah dengan sendirinya telah mewakili suara dari perempuan Muslim terutama dalam mempromosikan serta mengintegrasikan hak-hak perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhir abad ke 20, kemunculan ide feminisme dari barat membawa pengaruh signifikan di Indonesia, yang kemudian menandai babak baru dalam pembentukan paradigma serta pembaharuan Islam terutama dalam peran dan posisi perempuan Muslim di Indonesia. Pengenalan dan reinterpretasi terhadap ide-ide feminisme serta hak asasi manusia coba untuk di tafsirkan oleh para aktivis perempuan Muslim dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam.

Pengenalan ide-ide feminis dan demokratis telah menjadi perhatian utama bagi aktivis perempuan Muslim. Bersaing paradigma, termasuk hak asasi manusia, kesetaraan gender, prinsip-prinsip Islam, dan ide-ide feminis, telah membentuk perdebatan tentang posisi sosial perempuan dan pemberdayaan di Indonesia. Banyak organisasi mendedikasikan ambisi dan aspirasi mereka untuk promosi dan advokasi hak-hak perempuan. (Dayana Parvanova, 2012 : 1)

Pada saat yang sama, gerakan perempuan di Indonesia harus menavigasi pergeseran aliansi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam usaha mereka untuk membangun dasar yang kuat dari pengetahuan, keterampilan dan argumentasi dalam rangka meningkatkan pengaruh politik mereka dan otoritas sosial. (Dayana Parvanova, 2012 :1)

Cikal bakal lahirnya Nasyiatul Aisyiyah juga merupakan sebagai kebutuhan dalam menampung kepentingan kaum perempuan terutama yang terkait dengan nilai-nilai dan prinsip keislaman. Tidak berlebihan apabila menurut beberapa pengamat bahwa

organisasi Nasyiatul Aisyiyah masuk dalam kategori gerakan feminisme Islam.

Feminisme Islam, merupakan respon kreatif untuk peraturan ketat dan praktek diskriminasi yang memberlakukan status subordinat perempuan. Berdasarkan pengetahuan profesional dan reinterpretasi otonom dari sumber-sumber suci Islam dan metodologi berasal dari studi sosial dan jenis kelamin, feminisme Islam Indonesia menyediakan alat yang komprehensif untuk mempromosikan isu-isu perempuan di ranah publik Indonesia

Dalam *mindset* gerakan feminisme Islam, salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan adalah melalui mengkaji ulang kembali nilai-nilai humanis yang berada di dalam kitab suci maupun hadist dengan menganalisa pada peran dan posisi perempuan, sehingga dapat dengan baik diketahui tentang hak-hak perempuan yang sebenarnya dalam Islam. Selama ini, kitab suci dan hadist selalu diinterpretasikan secara sepihak oleh otoritas laki-laki yang seringkali tidak berpihak pada perempuan bahkan menciptakan tradisi yang diakui secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi Islam.

Keyakinan dan tafsir agama merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Disamping kebijakan pemerintahan dan budaya etnis atau tradisi, tafsir agama selama ini memiliki peran yang cukup besar untuk melanggengkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan ini telah masuk pada seluruh wilayah kehidupan, mulai dari tingkat kehidupan bernegara hingga berkeluarga. Salah satu wujud dari tafsir agama adalah apa yang telah dikenal oleh masyarakat pesantren dengan nama kitab kuning. Kitab kuning adalah buku-buku klasik yang berisikan tafsiran dan penjabaran ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan pola pikir dan format pra modern. Kitab ini secara populer dan meluas telah dipakai oleh para kyai dan santri di Pesantren. (Masdar F Maudi, 2000 : hal 167)

Sebagaimana telah diketahui, bahwa kemudian ajaran dari kitab kuning adalah bias gender, kedudukan perempuan dibawah kedudukan laki-laki, akibatnya pandangan seorang Kiai terhadap hubungan laki-laki dan perempuan adalah bias. Tidak ada kesetaraan bagi mereka, dan perempuan statusnya lebih rendah dari laki-laki. (Martin Van Bruinessen, 1995)

“Konsekuensi sebagai warga kelas dua kemudian menyebabkan perempuan harus beraktivitas di wilayah domestik adalah wilayah hak dan kewajiban perempuan hanya sebatas lingkungan rumah tangga”. Padahal sesungguhnya keberadaan perempuan memiliki posisi yang sama dalam hal hak dan kewajiban seperti layaknya laki-laki dalam menentukan hidupnya. Alasan lainnya karena pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan sebagai *harem* (sesuatu yang harus dijaga) dan memenjarakannya di dalam *hudud-hudud* (batas-batas). (Dewi Istiqomatul, Martono & Agus Witiningsih, 2014: hal 3)

B. Sejarah Berdirinya Gerakan Nasyyiatul Aisyiyah

Tidak bisa dipungkiri berdirinya Nasyyiatul Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan merupakan terobosan besar dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Kontribusi yang diberikan oleh Nasyyiatul Aisyiyah dalam memajukan kaum perempuan telah memberikan banyak manfaat bagi kepentingan perempuan khususnya pendidikan dan ketrampilan, terlebih lagi pada kondisi dimana masyarakat Indonesia berada dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, keadaan rakyat Indonesia di Indonesia sangat terbelakang, terlebih lagi kaum perempuan dan kalangan masyarakat bawah. Mayoritas rakyat Indonesia tidak bersekolah, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan bangsawan dan priyayi untuk bersekolah di sekolah-sekolah khusus yang didirikan oleh penjajah Belanda. Keistimewaan untuk mendapatkan pendidikan yang hanya diberikan kepada anak-anak dari kalangan bangsawan dan priyayi bukan tanpa alasan, sebagai bentuk dari politik timbal balik, dimana kalangan bangsawan dan priyayi merupakan “perpanjangan tangan” penjajah Belanda dalam mempermudah dan memperlancar kekuasaannya di Indonesia.

Keprihatinan terhadap kondisi bangsa tidak hanya melalui kekuasaan politik oleh kaum penjajah yang menyebabkan keterbelakangan, selain itu ditambah juga dengan keadaan terkungkungnya kaum perempuan oleh kultur dan tradisi. Kaum perempuan dituntut untuk patuh dan taat pada adat istiadat yang mengatur secara penuh hak dan kewajiban mereka. Hal tersebut terus berlangsung secara terus menerus. Melihat kondisi dari kaum perempuan tersebut, turut berkontribusi melatar belakangi pemikiran progresif dari Kartini¹ demi kemajuan dari kaum perempuan Indonesia. Pemikiran progresif Kartini tentang “emansipasi” untuk kemajuan kaum perempuan pada masa itu, dianggap sebagai titik terang dan rujukan bagi perkembangan gerakan perempuan di Indonesia.

Pemikiran-pemikiran progresif dari Kartini yang berusaha kuat untuk mengeluarkan perempuan dari “penjara domestik”, dimana kaum perempuan seringkali dijadikan objek ketimbang subjek. Kartini menginginkan posisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dimana perempuan juga bisa menjadi subjek dari kehidupan. Gagasan tersebut, dijadikan dasar pijakan oleh sebagian gerakan kaum perempuan sebagai “aksi”

untuk melakukan perjuangan progresif sebagai penerus dari ide-ide kesetaraan yang digagas oleh Kartini.

Sumbangsih pemikiran dari Kartini tersebutlah, kemudian turut juga direspon oleh gerakan wanita Muhammadiyah, yaitu “Aisyiyah dan Nasyyiatul Aisyiyah sebagai pioner dari gagasan perjuangan perempuan di era Modern. Berdirinya Nasyyiatul Aisyiyah (NA) tidak bisa dilepaskan dari komitmen Muhammadiyah-‘Aisyiyah untuk menjaga keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah memerlukan kader-kader tangguh guna melanjutkan estafet perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Gagasan mendirikan Nasyyiatul Aisyiyah bermula dari ide Soemodirdjo, seorang guru Standart School Muhammadiyah. Dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah, ia menekankan pentingnya peningkatan mutu ilmu pengetahuan, baik pada aspek spiritual, intelektual, maupun jasmani. (www.nasyiah.co.id)

Ide Soemodirdjo tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk menambah pelajaran praktik bagi para muridnya yang diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, maka pada tahun 1919, Soemodirdjo berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri siswa Standart School Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut diberi nama Siswa Praja (SP). Tujuan dibentuknya Siswa Praja adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama. (www.nasyiah.co.id).

Pada mulanya, SP mempunyai ranting-ranting di sekolah Muhammadiyah yang ada, yaitu di Suronatan, Karangajen, Bausasran, dan Kotagede. Seminggu sekali anggota SP Pusat memberi tuntunan ke ranting-ranting. Setelah lima bulan berjalan, diadakan pemisahan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam SP. Kegiatan SP Wanita dipusatkan di rumah Haji Irsyad (sekarang Musholla ‘Aisyiyah Kauman). Beberapa jenis kegiatan SP Wanita, yaitu pengajian, berpidato, jama'ah subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam Kauman agar menjalankan shalat subuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keputrian.

Nasyyiatul Aisyiyah sejak awal juga memperhatikan pendidikan kadernya dengan membentuk sekolah-sekolah berdasarkan usia. Inisiatif SPW untuk melakukan pendidikan terhadap kadernya juga ditunjukkan dengan berdirinya sekolah remaja putri berdasarkan usia *Jamiatul Athfal* (7-10 tahun), *Tajmilul Akhlak* (10-15 tahun), *Tholabus Saadah* (15-18 tahun). Pada kelompok *Jamiatul Athfal* pertemuan diadakan dua kali dalam seminggu dengan aktivitas membaca Al-Quran, menyanyi, kerajinan tangan, serta olah raga. Pada kelompok *Tajmilul Akhlak*, pertemuan diadakan setiap hari Jumat dan membahas tentang menjadi pribadi yang mandiri, isu-isu aktual lainnya, latihan berpidato, serta ketrampilan ringan lainnya seperti memasak, merajut, dan menjahit. Pada kelompok ketiga, *Tholabus Saadah*, aktivitas yang dilakukan utamanya adalah berkaitan dengan hukum keluarga, membangun keluarga sakinah,

¹Kartini seorang putri dari Bupati Jepara yang lahir pada tahun 1879, dianggap sebagai perempuan pertama di Indonesia yang berani menentang adat yang selama ini telah membelenggu perempuan Indonesia. Ia sangat cerdas dan responsif terhadap segala hal di dalam lingkungannya. Ia dianggap mampu menunggang ide-idenya dan menjelaskannya dengan dunia luar. Ide-ide tersebut dituangkannya dalam korespondensi dengan sahabat karibnya di Belanda Nyonya Abendonon, yang kemudian kumpulan dari korespondensi tersebut diterbitkan sebagai buku dengan judul “Habislah Gelap Terbitlah Terang” pada Tahun 1911. (Dikutip Dari : Hamidah, Gerakan Wanita Islam Indonesia, Suatu Kajian Historis Aisyiyah-Nasyyiatul Aisyiyah Dan Muslimat-Fatayat NU. Dalam Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tahun 2008, hal 48

belajar berceramah, serta administrasi organisasi (Syamsiyatun, 2007: hal 70-71)

Kegiatan SP berkembang cukup pesat. Jenis Kegiatan yang dilakukannya mulai tersegmentasi sesuai usia. Kegiatan Thalabus Sa'adah diselenggarakan bagi anak di atas umur 15 tahun. Aktivitas Tajmilul Akhlak diadakan untuk anak berumur 10-15 tahun. Dirasatul Bannat diselenggarakan dalam bentuk pengajian sesudah Maghrib bagi anak-anak kecil. Sedangkan Jam'iatul Athfal dilaksanakan seminggu dua kali untuk anak berumur 7-10 tahun. Selain itu, tak jarang diselenggarakan juga tamasya ke luar kota setiap satu bulan sekali. Pada tahun 1924, akhirnya SP Wanita mampu mendirikan Bustanul Athfal, yakni usaha untuk membina anak laki-laki maupun perempuan berumur 4-5 tahun. SP Wanita juga menerbitkan buku nyanyian berbahasa Jawa dengan nama Pujian Siswa Praja. Pada tahun 1926, kegiatan SP Wanita sudah menjangkau cabang-cabang hingga di luar Yogyakarta. (www.nasyiah.co.id)

SP Wanita mulai diintegrasikan menjadi urusan 'Aisyiyah di tahun 1923. Selanjutnya pada Konggres Muhammadiyah Ke-18 Tahun 1929, diputuskan bahwa semua cabang Muhammadiyah diharuskan mendirikan SP Wanita dengan sebutan 'Aisyiyah Urusan Siswa Praja'. Nama SPW pun mulai berganti menjadi Nasyiatul Aisyiyah setelah pada tahun 1931, dalam Konggres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta, ditetapkan agar semua nama gerakan dalam Muhammadiyah harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Adapun simbol padi yang menjadi lambang Nasyiatul Aisyiyah diputuskan dalam Konggres Muhammadiyah ke-26 Tahun 1938 di Yogyakarta, yang sekaligus juga menetapkan nyanyian Simbol Padi sebagai Mars Nasyiatul Aisyiyah.

Perkembangan Nasyiatul Aisyiyah semakin pesat pada tahun 1939 dengan diselenggarakannya Taman Aisyiyah yang mengakomodasikan potensi, minat, dan bakat putri-putri Nasyiatul Aisyiyah. Selain itu, Taman Aisyiyah juga menghimpun lagu-lagu yang dikarang oleh komponis-komponis Muhammadiyah dan dibukukan dengan diberi nama 'Kumandang Nasyi'ah.' Pada masa sekitar revolusi, percaturan politik dunia yang mempengaruhi Indonesia membawa akibat yang besar atas kehidupan masyarakat. Organisasi Nasyiatul Aisyiyah mengalami kemacetan. Nasyiatul Aisyiyah hampir tidak terdengar lagi perannya di tengah-tengah masyarakat. Baru setelah situasi mengijinkan, tahun 1950, Muhammadiyah mengadakan Mukhtar untuk mendinamisasikan gerak dan langkahnya. Mukhtar tersebut memutuskan bahwa Aisyiyah ditingkatkan menjadi otonom. Nasyiatul Aisyiyah dijadikan bagian yang diistimewakan dalam Aisyiyah, sehingga terbentuk Pimpinan Aisyiyah seksi Nasyiatul Aisyiyah di seluruh level pimpinan Aisyiyah. Dengan demikian, hat ini berarti Nasyiatul Aisyiyah berhak mengadakan konferensi tersendiri.

Pada Mukhtar Muhammadiyah di Palembang tahun 1957, dari Mukhtar Muhammadiyah disampaikan sebuah prasaran untuk mengaktifkan anggota Nasyiatul

Aisyiyah yang pokok isinya mengharapkan kepada Aisyiyah untuk memberi hak otonom kepada Nasyiatul Aisyiyah. Prasaran tersebut disampaikan oleh Baroroh. Selanjutnya pada Mukhtar Muhammadiyah di Jakarta pada tahun 1962, Nasyiatul Aisyiyah diberi kesempatan untuk mengadakan musyawarah tersendiri. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Nasyiatul 1919, Soemodirdjo berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri siswa Standart School Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut diberi nama Siswa Praja (SP). Tujuan dibentuknya Siswa Praja adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama. (www.nasyiah.co.id).

Pada mulanya, SP mempunyai ranting-ranting di sekolah Muhammadiyah yang ada, yaitu di Suronatan, Karangajen, Bausasaran, dan Kotagede. Seminggu sekali anggota SP Pusat memberi tuntunan ke ranting-ranting. Setelah lima bulan berjalan, diadakan pemisahan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam SP. Kegiatan SP Wanita dipusatkan di rumah Haji Irsyad (sekarang Musholla 'Aisyiyah Kauman). Beberapa jenis kegiatan SP Wanita, yaitu pengajian, berpidato, jama'ah subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam Kauman agar menjalankan shalat shubuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keputrian.

Nasyiatul Aisyiyah sejak awal juga memperhatikan pendidikan kadernya dengan membentuk sekolah-sekolah berdasarkan usia. Inisiatif SPW untuk melakukan pendidikan terhadap kadernya juga ditunjukkan dengan berdirinya sekolah remaja putri berdasarkan usia *Jamiatul Athfal* (7-10 tahun), *Tajmilul Akhlak* (10-15 tahun), *Tholabus Saadah* (15-18 tahun). Pada kelompok *Jamiatul Athfal* pertemuan diadakan dua kali dalam seminggu dengan aktivitas membaca Al-Quran, menyanyi, kerajinan tangan, serta olah raga. Pada kelompok *Tajmilul Akhlak*, pertemuan diadakan setiap hari Jumat dan membahas tentang menjadi pribadi yang mandiri, isu-isu aktual lainnya, latihan berpidato, serta ketrampilan ringan lainnya seperti memasak, merajut, dan menjahit. Pada kelompok ketiga, *Tholabus Saadah*, aktivitas yang dilakukan utamanya adalah berkaitan dengan hukum keluarga, membangun keluarga sakinah, belajar berceramah, serta administrasi organisasi (Syamsiyatun, 2006)

Kegiatan SP berkembang cukup pesat. Jenis Kegiatan yang dilakukannya mulai tersegmentasi sesuai usia. Kegiatan Thalabus Sa'adah diselenggarakan bagi anak di atas umur 15 tahun. Aktivitas Tajmilul Akhlak diadakan untuk anak berumur 10-15 tahun. Dirasatul Bannat diselenggarakan dalam bentuk pengajian sesudah Maghrib bagi anak-anak kecil. Sedangkan Jam'iatul Athfal dilaksanakan seminggu dua kali untuk anak berumur 7-10 tahun. Selain itu, tak jarang diselenggarakan juga tamasya ke luar kota setiap satu bulan sekali. Pada tahun 1924, akhirnya SP Wanita mampu mendirikan Bustanul Athfal, yakni usaha untuk membina anak laki-laki maupun perempuan berumur 4-5 tahun. SP Wanita juga menerbitkan buku nyanyian berbahasa Jawa dengan nama Pujian Siswa Praja. Pada

tahun 1926, kegiatan SP Wanita sudah menjangkau cabang-cabang hingga di luar Yogyakarta. (www.nasyiah.co.id)

SP Wanita mulai diintegrasikan menjadi urusan 'Aisyiyah di tahun 1923. Selanjutnya pada Konggres Muhammadiyah Ke-18 Tahun 1929, diputuskan bahwa semua cabang Muhammadiyah diharuskan mendirikan SP Wanita dengan sebutan 'Aisyiyah Urusan Siswa Praja'. Nama SPW pun mulai berganti menjadi Nasyiatul Aisyiyah setelah pada tahun 1931, dalam Konggres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta, ditetapkan agar semua nama gerakan dalam Muhammadiyah harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Adapun simbol padi yang menjadi lambang Nasyiatul Aisyiyah diputuskan dalam Konggres Muhammadiyah ke-26 Tahun 1938 di Yogyakarta, yang sekaligus juga menetapkan nyanyian Simbol Padi sebagai Mars Nasyiatul Aisyiyah.

Perkembangan Nasyiatul Aisyiyah semakin pesat pada tahun 1939 dengan diselenggarakannya Taman Aisyiyah yang mengakomodasikan potensi, minat, dan bakat putri-putri Nasyiatul Aisyiyah. Selain itu, Taman Aisyiyah juga menghimpun lagu-lagu yang dikarang oleh komponis-komponis Muhammadiyah dan dibukukan dengan diberi nama 'Kumandang Nasyiah'.

Pada masa sekitar revolusi, percaturan politik dunia yang mempengaruhi Indonesia membawa akibat yang besar atas kehidupan masyarakat. Organisasi Nasyiatul Aisyiyah mengalami kemacetan. Nasyiatul Aisyiyah hampir tidak terdengar lagi perannya di tengah-tengah masyarakat. Baru setelah situasi mengizinkan, tahun 1950, Muhammadiyah mengadakan Mukhtamar untuk mendinamisasikan gerak dan langkahnya. Mukhtamar tersebut memutuskan bahwa Aisyiyah ditingkatkan menjadi otonom. Nasyiatul Aisyiyah dijadikan bagian yang diistimewakan dalam Aisyiyah, sehingga terbentuk Pimpinan Aisyiyah seksi Nasyiatul Aisyiyah di seluruh level pimpinan Aisyiyah. Dengan demikian, hat ini berarti Nasyiatul Aisyiyah berhak mengadakan konferensi tersendiri.

Pada Mukhtamar Muhammadiyah di Palembang tahun 1957, dari Mukhtamar Aisyiyah disampaikan sebuah prasaran untuk mengaktifkan anggota Nasyiatul Aisyiyah yang pokok isinya mengharapkan kepada Aisyiyah untuk memberi hak otonom kepada Nasyiatul Aisyiyah. Prasaran tersebut disampaikan oleh Baroroh. Selanjutnya pada Mukhtamar Muhammadiyah di Jakarta pada tahun 1962, Nasyiatul Aisyiyah diberi kesempatan untuk mengadakan musyawarah tersendiri. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Nasyiatul Kepedulian organisasi Nasyiatul Aisyiyah terhadap masalah tersebut, dibuktikan dengan melakukan audiensi dan mengkritisi program-program pemerintah yang dianggap tidak pro gender, langkah konkret yang dilakukan oleh Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Selatan adalah mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi kebutuhan perempuan dan anak.

"Setelah melakukan audiensi dengan pemerintah melalui badan perlindungan anak dan perempuan, saya melihat

*dibeberapa mall di Palembang sudah dibuatkan ruang laktasinya, seperti contohnya yang ada di Opi Mall, ya setidaknya sudah ada respon dari pemerintah kita terhadap problem perempuan."*¹

Selain menyangkut masalah ketersediaan ruang laktasi tersebut, peran Nasyiatul Aisyiyah adalah ikut serta dan berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, mengingat kondisi Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang paling aktif sebagai lalu lintas peredaran dan perdagangan narkoba didunia dan sangat mengancam jiwa generasi muda bangsa. Karena kondisi yang mengkhawatirkan itulah, Nasyiatul Aisyiyah berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk pelan-pelan memutus rantai tersebut, seperti yang diungkap oleh Ani Aryani, sebagai berikut :

" Nasyiatul Aisyiyah juga melakukan kerjasama dengan BNN Pusat (Badan Penanggulangan Narkoba) sebagai upaya untuk menghambat penyebaran Narkoba yang lebih massif lagi. Kami melakukan ke rja sama dengan menandatangani MoU pada tanggal 18 Januari 2014 lalu".²

Dalam melakukan upaya menghambat penyebaran Narkoba khususnya pada tingkat lokal, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Selatan yang mendapat *support* dan bantuan langsung dari Badan Penanggulangan Narkoba (BNN) diantaranya adalah

- 1) Membentuk Unit berbasis Komunitas (*Community Based Unit/CBU*) yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba pada komunitas dengan memberdayakan potensi masyarakat dilaksanakan secara sistematis, bertahap, dan terarah melalui metode yang diakui dan dapat dipertanggung jawabkan
- 2) Diseminasi informasi, melalui pemberian informasi tentang bahaya Narkoba dengan pendekatan komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) sebagai proses kegiatan penyampaian/penyebarluasan (diseminasi) dan penerimaan pesan tentang bahaya Narkoba untuk meningkatkan dan memanfaatkan pengetahuan wawasan dan kemampuan khalayak sasaran dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggung jawab menuju terjadinya proses kekebalan (imun) masyarakat dari bahaya ancaman Narkoba.
- 3) Advokasi adalah aktivitas penggerakan segenap sumber daya yang ada untuk membela, memajukan, meningkatkan bahkan merubah tatanan sebuah kebijakan.
- 4) Pembentukan serta pemberdayaan kader yang anti penyalahgunaan Narkoba.

¹Wawancara dengan Ani Aryani (Ketua Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Selatan) tanggal 16 November 2016.

²Wawancara dengan Ani Aryani (Ketua Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sumatera Selatan) tanggal 16 November 2016.

- 5) Perumusan, penyusunan strategi dan pembuatan *roadmap* pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

3. Kesimpulan

Berkaitan dengan persoalan tersebut, Nasyyiatul Aisyiyah telah menyusun konsep gerakan yang lebih mengarahkan dan meneguhkan pendinamisasian Nasyyiatul Aisyiyah sebagai organisasi dan gerakan perempuan yang berlandaskan pada dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan diaktualisasikan melalui program keummatan. Program keummatan menitikberatkan kepada penyusunan program yang mengarah pada penyelesaian persoalan masyarakat, khususnya persoalan perempuan dengan bertumpu pada teori kehidupan masyarakat itu sendiri, melalui :

- 1) Peningkatan Peran Nasyyiatul Aisyiyah baik secara kelembagaan maupun personal kader Nasyyiatul Aisyiyah di semua tingkatan dalam pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut memiliki keberpihakan terhadap perempuan..
- 2) Penetapan kerangka gerakan program Nasyyiatul Aisyiyah 2004-2020 yaitu *Family Learning Centre* (Pusat Pembelajaran Keluarga). Semua perumusan kebijakan dan program organisasi diarahkan untuk menguatkan keluarga dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Keluarga dipandang sebagai wahana sentral dan utama dalam menanamkan nilai moral, agama, dan budaya serta memberdayakan seluruh anggota keluarga yang kelak dapat mewujudkan generasi berkualitas.
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kader serta peneguhan orientasi dan fokus gerakan organisasi. Kader Nasyyiatul Aisyiyah diharapkan adalah kader yang berkualitas baik bagi persyarikatan, masyarakat, maupun ummat. Adapun peneguhan orientasi dan fokus gerakan merupakan upaya Nasyyiatul Aisyiyah untuk memperjelas kekhasan gerakannya, yaitu berkhidmat pada pemberdayaan dan pencerahan perempuan dan anak disegala bidang.
- 4) Mengadakan MoU (kerja sama) dengan BNN pusat dalam upaya mencegah bahaya Narkoba, terutama dalam pergaulan generasi muda Kota Palembang
- 5) Mengadakan audensi dengan Badan Perlindungan Anak Dan Perempuan Propinsi Sumatera Selatan, untuk memberikan fasilitas (ruang laktasi) di beberapa ruang publik.

Daftar Pustaka

- [1] Berry, David 1982, *Pokok Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- [2] Bruisnessen, Van Martin 1995, *Kitab Kuning, Pesantren, Dan Tarekat : Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*. Mizan. Bandung

- [3] Darwin, Muhajir 2005. *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik*. Media Wacana. Yogyakarta
- [4] Dunn, William N 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University, Yogyakarta
- [5] Faisal, Sanafiah 1999, *Format-format Penelitian Sosial*. PT. Grafindo Persada, Jakarta
- [6] Faturrohman, Deden dan Wawan Sobari 2004, *Pengantar Ilmu Politik*, UMM Press, Malang
- [7] Fakhri, Mansour, 2008 *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [8] Karomah, Istiqomatul, Dewi. Martono, Agus Wartiningih 2014, *Citra Perempuan Pada Autobiografi Perempuan-Perempuan Haren Karya Fatima Mernissi*.
- [9] Lips, Hilary M, 1993. *Sex and Gender: An Introduction*, Myfield Publishing Company, London.
- [10] Lindsey, L, Linda ,1990, *Gender Roles a Sociological Perspective* ,Prentice Hall, New Jersey.
- [11] Maudi, F, Masdar, 2000, “*Perempuan Di Antara Lembaran Kitab Kuning*”, Dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya.
- [12] Mosse, Cleves Julia 2007, *Gender Dan Pembangunan*, RIFKA WCC & Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [13] Nugroho, Riant 2008, *Gender Dan Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- [14] Parvanova, Dayana 2012, *Islamic Feminist Activism in Indonesia: Muslim Women's Paths to Empowerment*, *Journal Austrian Studies in Anthropology Sondernummer*, vol 1, hh 1
- [15] Sjahmunir 2006, *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*. (editor : Alfan Miko). Andalas University Press, Padang
- [16] Soekanto, Soerjono 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*., PT. Grafindo, Jakarta
- [17] Subono, Nur Iman (dkk) 2008, *Jurnal Perempuan (YJP) Perempuan Partisipasi Politik*. YJP, Jakarta
- [18] Syamsiatun, Siti 2007, ' *A Daughter In The Indonesia Muhammadiyah : Nasyyiatul Aisyiyah Negotiates A New Status And Image*, *Journal of Islamic Studies*, vol 18, hh 70-71
- [19] Usman, Husani dan Purnomo 2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Bandung
- [20] Wieringa. E. Saskia 2010, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI*, Galang Press, Jakarta..